

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

SEMINAR HASIL PENELITIAN



PALEMBANG
7 SEPTEMBER 2016

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pos 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581



PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA PERIODE SEMESTER GENAP 2015-2016



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
7 September 2016**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma
Palembang
2016**

PROSIDING
SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA
PERIODE SEMESTER GENAP 2015-2016

© Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

Cetakan Pertama Tahun 2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reviewer

Dr. Koesharijadi, S.E., M.M
Dr. Kristina Setyastuti, M.M.
Sulaiman Helmi, S.E., MM
Verawaty, S.E., Ak., M.Sc
Cirtra Indah M, S.E., Ak., M.M.
Asmanita, S.E., M.Si

Editor

M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si
Irwan Septayuda, S.E., M.Si

Penerbit



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
<http://fekon.binadarma.ac.id>

ISBN : 978-602-74335-1-9

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadirat Allah SWT, karena atas kemudahan yang diberikan-NYA maka Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Periode Semester Genap 2015-2016 pada tanggal 7 September 2016 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tinggi dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar hasil penelitian.

Prosiding ini berisi makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang kompleks dan menuntut peran aktif seluruh pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan yang telah menghadiri pembukaan dan memberikan sambutan pada seminar ini dan para peserta seminar atas keikutsertaannya. Selanjutnya penghargaan juga patut diberikan kepada para presenter, editor, dan seluruh panitia pelaksana serta pihak-pihak terkait dalam seminar hasil penelitian ini atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan konsep dan aplikasi yang bermanfaat. Aamiin.

Palembang, September 2016

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DI KANTOR UPTD SAMSAT PALEMBANG M.Dicky Nugraha dan Wiwin Agustian.....	198
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN (Persero) SEKTOR KERAMASAN PALEMBANG Inike Anggun Cahyani dan Irwan Septayuda	207
STRATEGI PEMASARAN PADA USAHA KERUPUK KEMPLANG RIZKY SECARA ONLINE Martius Hasan Nopa dan Fitriasuri	219
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. RR JAYA ABADI PALEMBANG Ari Anggara dan Rabin Ibnu Zainal.....	229
PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA SMARTPHONE SAMSUNG ANDROID (STUDI PADA MAHASISWA BINA DARMA PALEMBANG) Apris dan Emi Suwarni	241
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH Desi Rahmawati dan Rolia Wahasusmiah.....	254
ANALISIS PERSEPSI KEPUASAN PELANGGAN ATAS KUALITAS PELAYANAN DAN KETERSEDIAAN BARANG PADA LIMA ALFAMART TOKO DI KOTA PALEMBANG Hariana Tambunan dan Lin Yan Syah	262

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH

Desi Rahmawati¹, Rofia Wahasumiah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma

desirah06@gmail.com¹, Rofia.Wahasumiah@binadarma.ac.id²

Abstract. This research aims to analyze real potential and tax effort of street lighting tax in Kota Prabumulih. This research used secondary data in which it is time series data from 2012 – 2015. Data collected indirectly through mediator namely official territorial government. The method analysis of data used descriptive analysis. The result of the research shows that real potential of street lighting tax in Kota Prabumulih is not appropriate to the target of street lighting tax determined by Department of Financial Management & Regional Asset of Kota Prabumulih. The effectiveness of street lighting tax shows tax collection and management of street lighting tax has been effective. Tax effort or ability to pay a tax in Kota Prabumulih is categorized as low yield and it is needed to increase in the future.

Keyword : *Real Potential, Tax Effort, Street Lighting Tax*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi riil, daya pajak (tax effort) dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) atau runtut waktu selama tiga tahun yaitu dari tahun 2012 – 2015. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dinas-dinas atau instansi pemerintah. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki kota prabumulih belum sesuai dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota prabumulih. Hasil perhitungan pajak penerangan jalan Kota Prabumulih tidak efektif. Daya pajak (Tax Effort) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di kota prabumulih masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Kata Kunci : *Potensi riil, Daya pajak, Pajak Penerangan Jalan*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan diharapkan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola komitmen untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup

signifikan terhadap indikator pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber Pendapatan Daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, maka pemerintah

daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penggalan potensi pajak daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2010).

Kemajuan pesat di Kota Prabumulih ditandai dengan kemajuan di bidang pendidikan, iptek, dan kepariwisataan. Ketiga hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan di beberapa sektor tersebut sejalan dengan pemakaian listrik di Kota Prabumulih yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang sangat bergantung kepada penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN. Besar kecilnya pajak penerangan jalan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti besarnya kemampuan pelanggan listrik, jumlah pelanggan listrik selain dari yang dihasilkan PLN, dan tingkat kolektibilitas dari pihak PLN.

Namun dalam pemungutan pajak daerah seringkali penerimaannya tidak efektif atau tidak mencapai target, jika penerimaan

pajak daerah tidak efektif maka akan menghambat perkembangan pemerintahan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, karena pajak daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk itulah penulis ingin mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah apakah sudah mencapai target apa belum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi Kota Prabumulih dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran Kota Prabumulih. Upaya pajak (tax effort) yang merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Pelaksanaan otonomi daerah direspon secara agresif oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan perda-perda terkait dengan pajak maupun retribusi daerah. Menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana Kontradiksi antara peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan pertumbuhan penerimaan dan tax effort pajak penerangan jalan menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila kita melihat target dan realisasinya, penerimaan pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk membuktikan secara *empiris* bagaimana Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah membandingkan data dan fenomena yang ada.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih, Jl. Jendral Sudirman KM.12 Kec. Caribai Prabumulih Sumatera Selatan. Fokus penelitian dikonsentrasikan pada Analisis Potensi Penerimaan Efektivitas dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih dari tahun 2013-2015.

2.2 Desain Penelitian

Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan terseleksi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih (Dispenda) dan data mengenai biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian

kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

2.3 Sumber Data

Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber data asli untuk tujuan tertentu. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti (Kuncoro, 2009). Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang ditujukan pada pegawai yang bergerak dalam bidang penerimaan pajak penerangan jalan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih yang meliputi data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga (Kuncoro, 2009). Data sekunder ini merupakan data yang berisi informasi-informasi menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama tiga tahun yaitu dari tahun 2013-2015. Data sekunder ini diperoleh melalui media perantara, dalam hal ini dari instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut

listrik per golongan tarif diperoleh dari PT. PLN Area Kota Prabumulih.

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan saata penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun teori sebagai hasil proses induksi dari wawancara terhadap fakta yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan pengembangan pola atau susunan teori

3. HASIL

3.1 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Potensi merupakan keseluruhan pendapatan yang memungkinkan dapat dicapai berdasarkan kondisi dan perkembangan sumber pendapatan yang dimaksud. Nilai potensi setiap sumber pendapatan daerah tersebut masih jarang untuk dilaporkan sebagaimana nilai target dan realisasi pendapatan. Analisis perhitungan potensi malak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Sumber data yang di dapat dari PT. PLN Persero Prabumulih mengatakan bahwa tarif Golongan tarif Bisnis Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 mengatakan bahwa Perhitungan Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2013 biaya beban berkisar 113.984.686.000, untuk tahun 2014 biaya beban berkisar 127.705.100.820, untuk tahun 2015 biaya beban berkisar 151.397.174.709.dengan Tarif Pajak Penerangan Jalan rata di posisi 9% serta Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yag relatif stabil

Prabumulih Tahun 2013-2015 mengatakan bahwa tarif Golongan rumah tangga di tahun 2013 berkisar 13.538.438.229 di tahun 2014 berkisar 14.436.368.334 dan di tahun 2015 berkisar 14.698.074.448, sedangkan tarif Industri

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dengan total 38.119.204.783

Menurut Penulis selama 3 tahun tersebut yang memiliki jumlah terbesar pada Potensi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan tarif di Kota Prabumulih adalah kedudukan pertama yaitu di tahun 2013 dengan nilai Rp 41.670.071.111 diperoleh dari tiga golongan tarif pajak penerangan jalan yaitu rumah tangga,bisnis dan golongan industri. Pada kedudukan yaitu di tahun 2015 dengan nilai Rp 35.211.879.000 diperoleh dari tiga golongan tarif pajak penerangan jalan yaitu rumah tangga,bisnis dan golongan industri menurut penulis dari beberapa bahasan yang telah diraikan diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidak jelasan dalam potensi pemungutan pajak penerangan jalan dikota prabumulih dan perlu adanya observasi untuk meningkatkan potensi pajak penerangan jalan yang ada di kota prabumulih.

3.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Mahmadi (2007:129) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektivitas apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Hasil wawancara dari semua hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2013-2015 diketahui bahwa efektivitas Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2013-2015 atau tiga tahun terakhir tergolong sangat kurang efektif (rendah).

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Prabumulih yang menunjukkan bahwa pemangutan dan Pengelola Pajak Penerangan Jalan di Kota Prabumulih sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Prabumulih hampir mencapai potensi penerimaan riilnya. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar efektivitas pajak ini dapat lebih efektif serta mampu memenuhi potensi penerimaan riilnya sehingga penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Menurut penulis sistematika perhitungan yang hampir sama antara realisasi dan potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut seharusnya menghasilkan nilai yang sama tetapi pada kenyataannya potensi memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan realisasi. Hal tersebut dikarenakan potensi merupakan keseluruhan pendapatan yang dapat diperoleh dari semua objek Pajak Penerangan Jalan baik yang sudah terbayarkan maupun yang masih tertutang sedangkan realisasi merupakan hasil pemangutan Pajak Penerangan Jalan yang sudah terbayarkan. Kinerja Pajak Penerangan Jalan yang tergolong potensial ikut mempengaruhi pencapaian realisasi Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat mendekati potensi riilnya (sangat efektif).

3.3 Tax Effort Pajak Penerangan Jalan

Menurut Waluyo tax effort (2010) untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtut waktu (time series). Penelitian dengan menggunakan runtut waktu akan membantu melihat bagaimana kinerja dari

penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Model analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak Pajak Penerangan Jalan yang digunakan yaitu untuk daya pajak (Tax Effort) perhitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Prabumulih.

Menurut, penulis terlihat pada tabel diatas bahwa selama tiga tahun, daya pajak mengalami naik turun selama kurun tahun 2013-2015 dan belum mengalami kenaikan lagi. Daya Pajak (Tax Effort) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (ability to pay) di Kota Prabumulih tergolong masih sangat rendah, hal itu ditunjukkan dengan persentase daya pajak terendah sebesar 0,26 persen dan daya pajak tertinggi sebesar 0,29 persen. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak, mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat membayar pajak di Kota Prabumulih masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan membayar dari masyarakat maka pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan kestabilan ekonomi dan politik diantaranya melalui peningkatan pendapatan per kapita serta perluasan kesempatan kerja sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa ditingkatkan yang pada saatnya nanti akan dapat meningkatkan kemampuan bayar masyarakat di suatu daerah.

3.4 Pembahasan Pajak Penerangan Jalan Kota Prabumulih

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Prabumulih merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT. PLN

Persero API Prabumulih yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening listrik yang kemudian disetorkan ke DPPKA. Penyediaan dan perawatan dari penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Prabumulih. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyediaan penerangan jalan di Kota Prabumulih antara lain.

Potensi penerangan jalan di Kota Prabumulih masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah Kota Prabumulih. Selain itu, wajib pajak dalam hal ini masyarakat memiliki andil yang besar dalam penerangan jalan, mereka memiliki ketataan membayar pajak yang tinggi sehingga penerimaan pajak penerangan jalan cenderung bisa ditingkatkan. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan diharapkan setiap desa akan memiliki penerangan sebanyak 20 titik penerangan di setiap desa.

Hasil wawancara mengatakan selama tiga tahun, golongan tarif yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar adalah golongan tarif rumah tangga (R), dengan total penerimaan sebesar Rp 29.134.442.782,00, kemudian golongan tarif industri (I) dengan total penerimaan Rp 25.119.204.783,00 dan yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling kecil adalah golongan tarif bisnis (B) dengan total penerimaan sebesar Rp 17.176.517.730,00.

Menurut penulis sistematisa perhitungan yang hampir sama antara realisasi dan potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut seharusnya

menghasilkan nilai yang sama tetapi pada kenyataannya potensi memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan realisasi. Hal tersebut dikarenakan potensi merupakan keseluruhan pendapatan yang dapat diperoleh dari semua objek Pajak Penerangan Jalan baik yang sudah terbayarkan maupun yang masih tertutang sedangkan realisasi merupakan hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang sudah terbayarkan. Kinerja Pajak Penerangan Jalan yang tergolong potensial ikut mempengaruhi pencapaian realisasi Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat mendekati potensi riilnya (sangat efektif).

Menurut Penulis yang membandingkan data yang ada pada kenyataan Pajak penerangan jalan yang ada di kota prabumulih tidak pernah dicad dengan baik ini terbukti dari target anggaran yang dibuat tidak pernah tercapai target yang dikategorikan kedalam Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 target yang dibuat tidak pernah tercapai dan perlunya sosialisasi oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih untuk mengetahui kenapa ini bisa terjadi, karna data di lapangan yang penulis dapatkan dari PT. PLN Persero Prabumulih total potensi penerimaan pajak yang sudah penulis analisis di tahun 2013 mencapai 41.670.071.111, di tahun 2014 mencapai 33.800.765.230 dan di tahun 2015 mencapai 35.211.879.000 dengan total potensi pajak penerangan jalan selama tiga tahun sebesar 109.621.541,34, dan ini berbanding sangat jauh dari target anggaran yang dibuat untuk pajak penerangan jalan selama tiga tahun yaitu berkisar

26.130.000.000,00, karena sebagaimana kita ketahui bersama kota prabumulih adalah kota penghubung lalu lintas perjalanan Sumatera Selatan.

Sedangkan potensi pajak penerang jalan setelah dilakukan semua analisis dan pengaruhnya kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak selama lima tahun sebesar 5,62 persen, pertumbuhan penerimaan mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) selama tahun 2013 hingga tahun 2015. Penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terjadi pada tahun 2012 dan 2013, turun sebesar 4,77 dan 13,41 persen. Pajak Penerangan Jalan di Kota Prabumulih memiliki rata-rata kontribusi 45,76 persen per tahun terhadap pajak daerah dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 23,23 persen per tahun. Selama kurun waktu lima tahun, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah mengalami penurunan terus dari tahun 2013-2015 dan

terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami 3 kali penurunan kontribusi yaitu pada tahun 2013, 2014,2015

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, Potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Prabumulih untuk tahun 2013 hingga tahun 2015 sangat lebih besar daripada realisasi dan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Prabumulih. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan potensi di Kota Prabumulih pada tahun 015 termasuk pada kriteria kurang efektif sebesar 76,89%. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Prabumulih pada tahun 2013-2015 rata-rata termasuk pada kriteria Kurang Efektif sebesar 74,11% dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2015 yaitu 76,89 dan pencapaian terendah pada tahun 2014 yaitu 71,82%, Tax effort Kota Prabumulih tergolong masih sangat rendah, hal itu ditunjukkan dengan persentase daya pajak terendah sebesar 0,26 persen dan daya pajak tertinggi sebesar 0,29 persen. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainal 2010 Peran Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar
- Dinas *Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih* 2016 : Penerimaan Pajak Penerangan jalan Kota Prabumulih
- Erlly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Standar Akuntansi Keuangan, Edisi 2012. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Indrakusuma 2011 Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang
- Kamus Bahasa Indonesia**. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
- Kuncoro, 2011. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muaroh 2010 *Aspek-aspek efektivitas Salemba Empat*. Jakarta.
- Mardiasno 2009 *Efektifitas kebijakan perpajakan*. Duka Satu, Edisi 9. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Monginsidi 2013 Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelolaan Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 37 tahun 2003 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 tahun 2011 tentang **Pajak Penerangan Jalan**
- PT. PLN APJ Prabumulih 2013. Laporan TUL Tahun 2013. Prabumulih: PT. PLN Persero Apj Prabumulih
- PT. PLN APJ Prabumulih 2014. Laporan TUL Tahun 2014. Prabumulih: PT. PLN Persero Apj Prabumulih
- PT. PLN APJ Prabumulih 2015. Laporan TUL Tahun 2015. Prabumulih: PT. PLN Persero Apj Prabumulih
- Riady 2010 Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara **Pemerintah Pusat dan Daerah**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahyo 2008 Teori dan Hukum Pajak Salemba Empat Jakarta.